

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Islam, Sosialisme, dan Wacana Kebangkitan Nasional

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Ahyar, Muzayyin
Publisher	IAIN Surakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-27 14:52:34
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/158911

ISLAM, SOSIALISME & WACANA KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh: Muzayyin Ahyar¹

Abstract: *It is too ironic, the independent state which has liberated since 69 years ago and proudly celebrate its independence day once a year, doesn't know the essence of the independence. The essence is the emergence of spirit of nationalism. There are many powers within this spirit of nationalism which has influenced on opposing the colonialisme, and the question that i am dealing with my article here is "what are the powers of spirit of nationalism? At least, there are two power, both are: Islam and sosialism-communism. This article discuss about the similarity spirit on both power. Either Islam or sosialisme has an ide to defend the oppressed minorities.*

Key Words: *Islam, sosialisme-komunis, kekuatan kebangkitan nasional.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini bukan merupakan ulasan ataupun *summary* dari apa yang pernah ditulis oleh HOS Tcokroaminoto dan kemudian menjadi sebuah buku komersial. Tulisan ini juga bukan bertendensi untuk mengatakan bahwa ide Islam dan Sosialisme lebih baik dari ide ide lainnya (misalnya kapitalisme, calvinisme dll). Namun, tulisan ini dapat menjadi sebuah penegasan dan "rememberisasi" atau proses pengingatan kembali terhadap adanya kekuatan sosial-politik pada zaman pra kemerdekaan, yang mana melahirkan sebuah gagasan kebangkitan nasioanal. Zaman tersebut merupakan zaman atas munculnya kesadaran akan kebebasan, ditandai dengan terbentuknya gerakan-gerakan perlawanan seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912) Partai Komunis Indonesia (1914), Taman Siswa (1922), Nahdhatul Ulama (1926) hingga Partai Nasional Indonesia (1927).

Kebangkitan nasional merupakan ruh daripada kemerdekaan. Untuk mencapai sebuah negara yang merdeka, masyarakat harus memiliki rasa dan jiwa kebangsaan atau dalam bahasa lainnya nasionalisme. Meminjam teori Ernest Gellner, masyarakat dapat membentuk suatu "state" yang bebas (dari kolonialisme) apabila telah terbentuk rasa kebangsaan yang digerakkan. Jadi kebangsaan (nationalism) adalah prasyarat untuk mencapai sebuah "state" yang merdeka.² Karena inilah saya katakan, kebangkitan nasional (yang menjadi hari nasional diperingati pada 20 Mei tiap tahunnya) adalah ruh yang dapat mengantarkan kita kepada kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan (terlebih setelah memasuki abad 21), tak banyak masyarakat mau membuka kembali lembaran historis mengenai kebangkitan nasional, sebagai wacana yang

¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI.

² Untuk memahami lebih lanjut tentang state, nation dan nationalism ini dapat dibaca di dua buku hebat karya Ernest Gellner "Nation and Nationalism" dan "Condition of Liberty, Civil Society and it's Rivals"

mengiringi bangsa ini menuju kemerdekaan. Secara umum, masyarakat pasca kemerdekaan hanya mengetahui wacana umum mengenai kebangkitan nasional. Misalnya saja seperti ini; Apa itu kebangkitan nasional? wacana yang menyuarakan kesatuan rakyat Indonesia dalam satu tujuan yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan gerakan organisasinya yang bernama Boedi Oetomo, *finish*, itu saja. Padahal terdapat esensi yang sangat penting di dalam wacana kebangkitan nasional, esensi tersebut terdiri dari, paling tidak, dua ideologi besar (meskipun selain dua elemen ini, banyak lagi yang terlibat dalam proses kemerdekaan) yang menjadi “saraf sensorik” untuk memberi signal kepada pergerakan-pergerakan pembebasan di Hindia-Belanda sebagai “saraf motorik” menuju kemerdekaan Indonesia.

Dalam perjalanan kebangkitan nasional, semenjak berdirinya gerakan sosial Budi Utomo pada 20 Mei 1908 (bahkan sebelum itu) hingga kemerdekaan tercapai, terdapat dua kekuatan sebagai sumber perlawanan terhadap penjajahan. Dua kekuatan tersebut merupakan Islam dan watak sosialisme. Karena hal inilah, kajian tentang Islam, sosialisme dan wacana kebangkitan nasional menjadi penting dan menarik untuk diutarakan, bahwa; Islam dan sosialisme itu tidak selalu menjadi hal yang harus dihadapkan pada sebuah pertentangan.

B. Setting Politik (Islam) Hindia Belanda

Sebagaimana diketahui dalam teori kekuasaan negara modern, peralihan kekuasaan dapat dilakukan dengan dua macam cara; pertama secara konstitusional dan kedua inkonstitusional. Dikatakan konstitusional apabila peralihan kekuasaan tersebut sesuai dengan sistem yang dirancang dan disepakati oleh beberapa kalangan yang ada di wilayah tersebut, selain itu, segala cara untuk “merebut” kekuasaan seperti invasi, kudeta dianggap sebagai usaha inkonstitusional dan bahkan dianggap sebagai kejahatan politik. Namun pada abad abad pertengahan, hal yang kita anggap sebagai sebuah jalan inkonstitusional menjadi sebuah usaha yang “wajar” dalam perebutan kekuasaan. Sehingga, tak heran pada zaman tersebut sering terjadi penaklukan wilayah-wilayah kekuasaan, karena memang inilah yang menjadi “*legitimate order*” dalam hal kekuasaan pada zaman tersebut. Begitu pun anggapan dunia internasional yang terjadi ketika Belanda merebut kekuasaan di beberapa daerah di Nusantara, mungkin, tidak ada yang salah dengan hal ini pada zaman tersebut.

Belanda menduduki wilayah kepulauan Nusantara sekitar 4 abad yang lalu dengan usaha yang terkesan merampas atau dikatakan “inkonstitusional” (apabila dilihat dari abad 21). Pendudukan wilayah Ambon atas kekuasaan Portugis pada tahun 1605 menjadi keberhasilan politik tersendiri bagi Belanda dalam menguasai Nusantara. Hal ini berimbas pada pembentukan markas besar Belanda di wilayah bagian barat Nusantara tepatnya di daerah sekitar Banten.³

Pembentukan markas besar membuat Belanda memainkan peran politik di seluruh wilayah Nusantara. Sistem pemerintahan di setiap wilayah dibentuk sebagai bentuk kuasa negeri Belanda terhadap bumi Nusantara. Namun, kekuasaan Belanda ini tak berjalan mulus, khususnya di pulau Jawa, pemerintah Belanda menyadari pertentangan ini (salah satunya) datang dari kalangan muslim yang menggaungkan wacana Belanda sebagai “kafir” yang harus diperangi. Bukan tanpa alasan, semua ini karena masyarakat muslim pribumi merasa terkekang oleh peraturan pemerintah Belanda yang mencampuri kehidupan beragama mereka seperti melarang muslim untuk pergi berhaji pada

³ M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Gadjah Mada University Press, 1991 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet.X, 2011) hlm.40.

tahun 1661.⁴ Ketegangan ini terus dirasakan oleh pemerintah, sehingga beberapa orang pemerintahan Belanda menyadari harus melakukan sentuhan-sentuhan yang tujuannya “mempolitisasi” Islam. Salah seorang yang menyuarakan politisasi Islam di Hindia- Belanda ini adalah Snouck Hurgronje, seorang penasehat Hindia Belanda pada tahun 1889-1936.

Snouck Hurgronje berpendapat bahwa pemerintah Belanda tidak dapat mengabaikan sistem politik Islam, dalam artian Islam yang telah dimanifestasikan dalam bentuk sistem sosial. Snouck juga berpendapat pemerintah tidak boleh menyentuh dogma Islam yang telah di-imani masyarakat Nusantara yang benar-benar bersifat keagamaan.⁵ Ide-ide Snouck ini menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah Belanda mengingat demi memuluskan kekuasaannya. Inilah yang melatar belakangi lahirnya *Kantoor voor Inlandsche zaken* atau kantor urusan pribumi (khususnya berkaitan dengan Islam) yang didukung oleh kaum liberal dan humanitarian Belanda,⁶ sebagai alat untuk melaksanakan ide-ide Snouck. Kantor ini mulai mengurus permasalahan umat Islam yang dikoordinasikan kembali dengan instansi-instansi pemerintah Hindia Belanda lainnya. Kepengurusan wakaf dan zakat dikoordinasikan dengan department keuangan, menawal organisasi-organisasi keagamaan berkoordinasi dengan departemen dalam negeri. Bukan hanya itu, kantor ini juga mengurus masalah haji dalam hal pemeriksaan jamaah yang ingin berangkat haji, bekerjasama dengan beberapa perusahaan pelayaran, hingga mengurus harta bagi yang meninggal selama perjalanan haji.⁷

Ide-ide politik Islam Snouck ini memang membantu pemerintah Belanda menemukan strategi menghadapi umat Islam di Indonesia, dengan demikian analisa Snouck bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan sistem politik Islam terbukti dan dapat diterapkan. Namun, nampaknya ide-ide Snouck ini hanya berjalan pada masa transisi dan awal-awal abad ke XX. Laju modernisme Islam dan Pan Islam yang bersal dari Mesir dan Turki (juga daerah kekuasaan Turki seperti jazirah Arab) membawa umat Islam memperluas penghayatan agamanya bukan lagi kepada Islam sebagai iman saja, tetapi harus dimanifestasikan ke dalam gerakan politik yang membebaskan. Inilah titik tolak lahirnya beberapa organisasi Islam modern “beraroma” politik dengan semangat pembebasan dari penjajahan.

Pemerintah Belanda yang mengadaptasikan Islam dan sistem pemerintahan ini dapat membantu pemahaman kita bahwa keran kebangkitan nasional telah dibuka sendiri secara tidak langsung oleh pemerintah Belanda. Tentunya situasi ini disambut baik oleh beberapa aktifis yang ingin menyuarakan Indonesia merdeka, mereka membentuk organisasi-organisasi dengan semangat kebangkitan nasional melalui beberapa ideologi termasuk ideologi Islam dan sosialisme.

⁴ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm.17.

⁵ Snouck Horgronje, *Kumpulan Karangan*, terj. Sultan Maymun dan Rahayu S. Hidayat, 1994 (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994) hlm. 42.

⁶ Penting untuk diketahui, bahwa ideologi politik di Negara Hindia Belanda tidak tunggal, terlebih ketika akhir abad ke XIX dan memasuki awal abad XX. Terdapat beberapa ideologi politik yang termanifestasikan ke dalam partai seperti Katholieke volkpartij, anti-revolutionary partij, Christian historical partij, volkspartij voor virjheid en democratic(liberal), partij van de arbjd (sosialis), communistische partij Nederland (komunis). Kantor urusan pribumi ini juga banyak mendapat tentangan dari masyarakat Belanda lainnya. Mereka menganggap kantor ini terlalu lunak terhadap pribumi.

⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, hlm.108.

C. Islam dan *Mustad'afien*

Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat masih tersekat-sekat di dalam ruang pemisah antara keturunan elit kerajaan, tuan tanah, dan masyarakat biasa. Keadaan seperti ini menggiring para ulama untuk meneriakkan wacana Islam sebagai alat pemersatu. Hanya ada satu suara perlawanan yaitu penjajah sebagai “kafir” yang perlu dianggap sebagai lawan. Inilah yang menjadi kewibawaan rohani beberapa ulama ketika itu selain menolak dijadikan alat kekuasaan kerajaan. Ditambah dengan semangat Pan Islam yang telah diurikan pada paragraf sebelumnya, semenjak itulah Islam terus menjadi lambang nasionalisme Indonesia.⁸

Wibawa Islam ini semakin membanggakan penganutnya ketika dibentuknya Sarekat Islam (SI) oleh Haji Oemar Said pada tahun 1911, pergerakan ini sebagai wajah baru dari Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Haji Samanhudi, seorang saudagar Batik di Kartasura. Sarekat Islam ini mengawali beberapa organisasi dengan ideologi Islam sebagai bentuk kebangkitan nasional. Pembentukan Sarekat Islam ini diikuti dengan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Ini merupakan bukti bahwa Islam sebagai ideologi perlawanan telah terdiaspora ke dalam hati kaum muslimin pada zaman itu.

Dalam perjalanannya (terlepas dari dikotomi antara islamis tradisional dan modern), Islam sebagai ideologi ini telah meminimalisir intervensi Belanda terhadap kekuatan politik nasional. Pada tahun 1937, semua pergerakan yang menjadikan Islam sebagai Ideologi perlawanan mencoba untuk melebur ke dalam satu wadah yang dinamakan *Majlis Islam A'la Indonesia* (MIAI) yang dipelopori antara lain oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Mas Mansur, KH. Wahab Hasbullah KH. Ahmad Dahlan, dan juga beberapa tokoh SI,⁹ sikap dan tujuan dari terbentuknya majlis cikal bakal Masyumi ini tidak berubah, yaitu tetap dengan esensi untuk menghadapi kaum kolonial.

Selain itu, organisasi pergerakan Islam yang menyuarakan Islam sebagai ideologi perlawanan adalah *Jong Islamieten Bond* (Persatuan Pemuda Islam) dan *Studenten Islam Studie-Club* (Perkumpulan Mahasiswa untuk Studi Islam). Tokoh yang kita kenal dari pergerakan pertama disebut adalah Natsir dan Mohamad Roem, sedangkan pergerakan yang disebut terakhir terkenal dengan tokohnya Prawoto dan Yusuf Wibisono. Kedua organisasi ini kurang familiar di kalangan rakyat karena memang lebih bersifat akademis, dan keanggotaannya merupakan kalangan pemuda terpelajar dari pendidikan tinggi ala Barat. Hal lain yang membuat pergerakan ini kurang dikenang karena perlawanan yang tidak terlalu frontal dan lebih menggunakan *soft power* sebagai metode perlawanan terhadap kolonial. Meskipun demikian, kita dapat melacak bahwa dalam tubuh organisasi ini terdapat ideologi perlawanan sebagaimana yang terdapat dalam tubuh SI, Muhammadiyah ataupun NU. Misalnya, dalam sebuah artikel yang ditulis dalam *Het Licht*¹⁰ bahwa dari beberapa kelompok keanggotaan *Jong Islamieten Bond* adalah dari mereka yang berkeyakinan bahwa nasionalisme Indonesia tidak dapat terbangun jika tanpa Islam, dan tentunya jika ingin membangun

⁸ Zaini Mochtarom, Santri dan Abangan di Jawa, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1988) hlm.38.

⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm.16.

¹⁰ Het Licht adalah majalah terbitan Jong Islamieten Bond. Dikenal juga dengan nama majalah Annur. Dan artikel ini ditulis oleh Titi Marsoeti pada Het Licht tahun VII (1931), sayangnya keanggotaannya dalam Jong Islamieten Bond tidak dapat dilacak.

nasionalisme Indonesia, masyarakat harus mengusir kekuasaan penjajah di Indonesia.

D. Sosialisme dan Kaum Tertindas

Kekuatan kedua yang perlu diingat dalam kebangkitan nasional adalah ide-ide sosialisme komunis. Memang sosialisme dan komunisme berbeda dalam tataran praktisnya, namun komunisme memiliki dasar sosialisme, berarti sosialisme adalah nilai dari komunisme. Komunisme yang kemudian menjadi kekuatan politik telah hadir di Indonesia pada tahun 1914 yang dibawa oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau lebih dikenal sebagai Henk Sneevliet. Sneevliet mendirikan perkumpulan Demokrat Sosial Hindia atau Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV),¹¹ partai berhaluan kiri di Surabaya, inilah cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan partai komunis pertama di Asia di luar wilayah Soviet. Kekuatan ini secara nyata menjadi ancaman politik di Hindia Belanda karena beberapa kali melakukan gerakan perlawanan, sejak tahun 1923 komunisme telah melakukan gerakan perlawanan seperti pemogokan kerja dan pemberontakan.

Tokoh-tokoh terkenal yang banyak menyuarakan ide-ide berbau sosialis ini adalah Tan Malaka, Semaun, Musso, Ali archam, D.N Aidit dll. Pemikiran-pemikiran sosialis pun banyak termanifestasikan ke dalam beberapa partai dan kelompok seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Pergerakan Kaum Buruh Revolusioner (PKBR) yang merupakan pergerakan yang dibentuk oleh Semaun, Sarekat Buruh, Sarekat Islam yang terpecah ke dalam dua kubu yang dikenal dengan SI Merah dan SI putih, Sarekat Islam merah berusaha bersikap netral terhadap Islam dan lebih ingin menunjukkan paham sosialisnya. Bahkan ide-ide Sosialis ini juga sampai di Kalimantan Barat yang dikenal dengan Sarekat Dayak (sekarang menjadi Pakat Dayak) yang didirikan oleh Hausman Baboe. Hausman Baboe sendiri adalah sahabat dari Tjokroaminoto yang kita ketahui memiliki pandangan sosialisme, Hausman Baboe juga seorang mantan penasehat administrasi SI.¹² Beberapa kelompok yang menganut paham sosialis ini berhasil memobilisasi kaum buruh untuk melakukan pemogokan kerja dan pergerakan lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Apabila kekuatan Islam bersumber dari aqidah tauhid dan misinya membela kaum *mustad'afien* atau kaum "lemah", penganut sosialisme menjadikan ideologi anti borjuisnya sebagai dasar kekuatan untuk membentuk masyarakat sosialis yang membela kaum tertindas. Karena ideologi inilah tak sedikit dari masyarakat "abangan" pada zaman itu yang menjadi simpatisan terhadap pergerakan bernuansa sosialis tersebut.

Kalangan yang menjadi subjek sekaligus objek perjuangan kaum sosialis adalah buruh (buruh tani dan buruh lainnya). Para petani, menjadi penyumbang simpatisan yang cukup signifikan terhadap ide sosialis ini. Partai Komunis (yang dalam hal ini menjadi wadah manifestasi ide sosialisme), sangat keras menyuarakan perjuangan para petani. Partai Komunis menjadikan masyarakat petani

¹¹ Mengenai detail Masuknya ISDV di Indonesia ini bisa lebih jelas dibaca pada buku Ricklefs "Sejarah Indonesia Modern".

¹² Informasi ini terlacak dari laporan manajemen Hindia Belanda tahun 1924 "Verslag Van Bestuur En Staat Van Nederlandsch-Indie, Suriname En Curacao 1924" hlm.19.

¹³ Peter Edman, Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit, terj. Dwi Pratomo Yulianto, (Center for Information Analysis, 2005) hlm. 14.

sebagai massa dalam mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, hal ini tergambar dari pesan Lenin kepada para pemimpin komunis dari negara-negara di belahan timur (khususnya Indonesia) yang mengatakan bahwa massa utama adalah masyarakat petani.¹³

Selain masyarakat petani, kaum wanita yang sedikit-banyak menghirup ide sosialisme ini, berada dalam beberapa wadah organisasi seperti Sarekat Istri Buruh Indonesia dan Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Meskipun terdapat antitesa yang mengatakan bahwa gerwani bukan PKI, namun penulis masih mengakui bahwa gerwani memiliki kedekatan secara ideologis.¹⁴Gerwani memiliki perjalanan organisasi yang cukup dinamis semenjak tahun 1932 merupakan organisasi perempuan Istri Sedar, organisasi perempuan istri sadar inilah cikal bakal dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar yang kemudian mengganti nama menjadi gerwani. Gerwani pernah dibubarkan ketika rezim orde baru karena dianggap (kalau tidak mau menyebut dituduh) terlibat dalam pemberontakan G30S PKI. Pembubaran organisasi wanita ini merupakan suatu hal yang juga disayangkan dalam konteks gerakan feminisme Indonesia, karena gerwani telah turut memperjuangkan ide-ide kebangkitan nasional dari kalangan wanita. Para petani dan wanita menjadi kalangan yang merepresentasikan kaum-kaum tertindas yang disuarakan oleh penganut ide-ide sosialisme, salah satunya oleh partai komunis.

E. Penutup

Pembelaan kaum islamis terhadap para *mustad'afien*, dan perlawanan kaum sosialis terhadap masyarakat pemodal yang sewenang-wenang seakan menjadi titik temu antara Islam dan Sosialisme. Kedua ideologi tersebut memiliki esensi untuk melepaskan masyarakat dari segala penindasan, sehingga berawal dari ideologi tersebut melahirkan sebuah kesadaran revolusioner masyarakat dengan menjadikan Islam dan watak sosialisme komunis sebagai ideologi perlawanan.

Nampaknya, melalui titik temu inilah kita dapat menemukan beberapa tokoh yang menyandingkan antara Islam dan sosialisme. Kita mengenal HOS. Tjokroaminoto dengan gagasan yang tertuang dalam bukunya Islam dan Sosialime, Kiai Misbah di Surakarta dengan Medan Moesliminnya, kemudian terdapat tokoh seperti Datoek Batoeah yang bergerak di pulau Sumatra. Beberapa tokoh ini berpendapat bahwa Islam juga merupakan sebuah gerakan politik nyata yang memperjuangkan kaum *mustad'afien*, dan inilah yang menjadi ancaman serius bagi Penjajah pada zaman tersebut. Seirama dengan pernyataan ini, Snouck Hurgronje berpendapat bahwa yang menjadi lawan kolonial adalah Islam sebagai ideologi politik dan bukan Islam sebagai keyakinan normatif. Tidak cukup dengan Islam, kekuatan perlawanan harus didorong dengan watak dan semangat sosialisme komunis, penggabungan dua hal ini sebagai antitesa antara idealisme teologis dan realisme empiris dan menjadi sebuah kekuatan besar yang melawan penindasan. Bahkan dalam salah satu disertasi yang meneliti tentang komunisme di surakarta berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa kebangkitan nasional seorang muslim haruslah juga seorang komunis.¹⁵

Tidak bisa dilupakan bahwa Islam dan sosialisme pernah menjadi senjata ampuh dalam proses

¹⁴ Hikmah Daniah, Gerwani bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hlm. 13.

¹⁵ Syamsul Bakri, Gerakan Komunisme Islam di Surakarta 194-1942, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014). Sebagai perbandingan, tesis yang setarik nafas dengan wacana Islam dan Komunisme ini adalah penelitian Nor Huda, berjudul "Wacana Islamisme dan Komunisme, Geneologi Intelektual Hadji Muhammad Misbah 1876-1926" .

liberasi dan independensi bangsa Indonesia. Kedua kekuatan ini selalu ber-adu “mesra” dalam tujuannya membangun Indonesia, bahkan, setelah selangkah kita memasuki gerbang kemerdekaan Indonesia. Dalam risalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kita masih dapat melihat dialog antara dua kekuatan ini, ketika tiga kubu berpendapat mengenai dasar negara Indonesia, Kahar Muzakar dan Ki Bagus Hadikusumo dengan konsep Islamnya, M. Yamin dan Hatta dengan konsep sekulernya, Sukarno dan Soepomo dengan konsep kebangsaan dan gotong royongnya, yang mana ini merepresentasikan beberapa ide-ide sosialisme. Kini, setelah 69 tahun merdeka, kedua kekuatan politik yang menjadi ideologi perlawanan kaum tertindas, seakan tersembunyi di balik hingar-bingarnya kemerdekaan. Islam seolah hanya menjadi pemanis keagamaan yang larut dalam fantasi ke-khusyu’an beribadah. Padahal semangat keislaman seharusnya dapat kita wujudkan pula pada semangat pemberantasan korupsi yang saat ini tengah menjadi masalah besar di beberapa negara berkembang termasuk di Indonesia. Sementara, gagasan sosialisme telah diistirahatkan total dalam sarkofagus keabadian setelah “ulahnya” yang dianggap mengancam kesatuan republik Indonesia. Padahal nilai sosialisme dapat menjadi inspirasi sebuah sistem *social security net* yang lebih baik, sebagaimana yang diterapkan di negara-negara di Eropa barat, yang itu diambil dari nilai-nilai sosialisme. Selain itu, nampaknya lebih sesuai dengan watak komunitarian bangsa Indonesia apabila kita adaptasikan dalam pergerakan politik, bukan politik liberal “setengah hati” sebagaimana kita anut sekarang.

Karena traumatik yang berkepanjangan, ide-ide sosialisme tidak dapat lagi dihidupkan. Namun tak salah kiranya kita mengingat-ingat memori sejarah, membuka kembali sedikit memoar para revolusioner kemerdekaan, minimal demi menghargai bahwa Islam dan sosialisme adalah dua kekuatan yang pernah mengantarkan kita pada kebangkitan nasional yang merupakan semangat dari kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Bakri, Syamsul, *Gerakan Komunisme Islam di Surakarta 1914-1942* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014).
- Daniah, Hikmah, *Gerwani bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007).
- Edman, Peter, *Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit*, terj. Dwi Pratomo Yulianto (t.k: Center for Information Analysis, 2005).
- Horgronje, Snouck, *Kumpulan Karangan*, terj. Sultan Maymun dan Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1994).
- Laporan Manajemen Hindia Belanda, *Verslag Van Bestuur En Staat Van Nederlandsch-Indie, Suriname En Curacao 1924*,
- M.C., Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Gadjah Mada University Press, 1991 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet.X, 2011).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Mochtarom, Zaini, *Santri dan Abangan di Jawa* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1988).
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Titi Marsoeti, *Het Licht Jong Islamieten Bond*. Dikenal juga dengan nama Majalah *Annur*. *Jong Islamieten Bond*, Tahun VII 1931.